

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital seperti saat ini menjadikan teknologi sangat dibutuhkan keberadannya dalam kehidupan masyarakat. Pada saat ini tidak ada satu pun hal yang tidak menggunakan teknologi, mulai dari alat untuk berkomunikasi hingga sebagai alat transaksi. Begitu pula di instansi pemerintah, teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pelayanan publik, oleh karenanya agar pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah menjadi semakin berkualitas, pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dan pemerintah dapat menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan juga akuntabel.

Adanya teknologi dalam instansi pemerintahan dapat memberikan kemudahan bukan hanya bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi namun juga bagi instansi pemerintahan dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas, maka pemerintah pun menerapkan *E-Government* yang bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan Indonesia yang baik atau *Good Governance* dimana terdapat transparansi dan akuntabilitas didalamnya. *E-Government* sendiri merupakan sebuah sistem informasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan berbasis internet untuk masyarakat yang bertujuan untuk memberi akses layanan publik oleh pemerintah.

Adanya *E-government* dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang sejalan dengan prinsip *good governance*. Impelementasi *E-Government* sudah diterapkan di berbagai daerah dan berbagai bidang tidak terkecuali bidang keuangan daerah. Pemerintah Daerah dewasa ini telah menerapkan *E-Government* dengan membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan informasi keuangan yang komprehensif dan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern, maka akses informasi bagi masyarakat luas akan semakin mudah dan terjangkau, oleh karenanya pemerintah memerlukan sistem informasi keuangan yang lebih terbuka dan memudahkan proses konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem informasi keuangan tersebut adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu sebuah aplikasi terpadu dari pemerintah yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Adanya SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah semakin memudahkan para pegawai dalam menyediakan

informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya yaitu penyebaran informasi keuangan yang transparan sehingga memudahkan pengendalian, pelaporan serta penyebaran informasi.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan salah satu instansi pemerintah yang menggunakan SIPKD dalam mengelola keuangan daerah mulai dari tahun 2011. Adapun target dan realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yaitu:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	430.415.200.497	255.482.016.402	59%
2015	284.792.781.899	266.643.826.915	93%
2016	123.003.831.445	98.222.429.835	80%
2017	304.094.614.392	252.491.117.896	83%
2018	219.717.981.304	171.407.995.374	78%

Sumber : LRA Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan tabel diatas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif sejak tahun 2014. Dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPKD di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ternyata masih terdapat banyak masalah, masalah-masalah tersebut diduga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Barat sehingga realisasi anggaran cenderung naik dan turun. Diduga masalah-masalah tersebut diantaranya, adalah :

Tabel 1.2
Masalah Penelitian

Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPKD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda. 2. Terkadang masih ada salah ketik angka dan koding belanja
Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan SIPKD atau internet yang masih sering <i>not responding</i> ketika sedang melakukan input ataupun susah para pegawai untuk <i>login</i> ke dalam SIPKD

Sumber: Hasil Penelitian Diolah oleh Peneliti Tahun 2019

Masalah – masalah tersebut diduga karena ada beberapa pegawai yang tidak mengikuti sosialisasi SIPKD. Sosialisasi SIPKD sendiri dilakukan setiap tahunnya dan diikuti oleh pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Berikut daftar pegawai yang mengikuti sosialisasi SIPKD :

Tabel 1.3
Pegawai Yang Mengikuti Sosialisasi SIPKD

	Ikut sosialisasi	Tidak ikut sosialisasi	Jumlah
	19	10	29
%	65%	35%	100%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dikelola oleh peneliti

Tahun 2019

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti merasa penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dituangkan dalam judul skripsi yang berjudul “**Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat**”

B. Fokus Masalah

Permasalahan yang dihadapi terkait efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, di antaranya adalah:

1. Banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPKD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda.
2. Terkadang masih ada salah ketik angka dan koding belanja dalam penginputan pada SIPKD.
3. Sistem yang masih sering *not responding* ketika sedang melakukan input ataupun susah para pegawai untuk *login* ke dalam SIPKD.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoretis, yaitu untuk memperluas pengetahuan serta pengalaman serta wawasan dalam menerapkan teore-teore yang peneliti telah peroleh selama menempuh kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pengambilan keputusan dan juga untuk menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat terkait dengan masalah tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah membutuhkan administrasi publik untuk lebih memahami bagaimana hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksakan suatu kegiatan dengan efektif dan efisien sejalan dengan

pendapat dari Chandler dan Plano dalam (Hakim 2011:20) bahwa administrasi publik adalah:

“Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”

Dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien maka pemerintah mengadakan otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan etos kerja dan produktivitas pemerintah daerah. Begitu pun dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah wajib mengelola sumber daya keuangan daerah dengan optimal dengan menerapkan prinsip *Good governance*, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Salah satu strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan *Good Governance* adalah dengan menggunakan teknologi, Pemerintah daerah wajib memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini termasuk pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Salah satu penerapan *E-Government* dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan adanya sebuah sistem informasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menurut PP No. 56 Tahun 2005 2005 sebagaimana

telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun pasal 13 ayat a adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini ada agar pengelolaan keuangan daerah dapat efektif dan mencapai tujuannya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan berjalan dengan efektif apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung. Efektivitas menurut (Mahmudi 2005:86):

“Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan”

Agar sistem informasi menjadi efektif, menurut DeLone dan Mclean dalam (Mustakini 2007:129) dimensi keberhasilan dari sistem informasi yaitu:

1. Kualitas Informasi

Kualitas sistem berhubungan dengan kualitas dari keluaran sistem informasi. Dimensi ini berhubungan dengan isu – isu, yaitu:

- a. Relevan
- b. Ketepatanwaktu
- c. Akurasi informasi yang dihasilkan dari oleh sistem informasi.

2. Kepuasan pengguna

Kepuasan pengguna dihubungkan dengan respon penerima dari penggunaan keluaran sisten informasi.

3. Penggunaan

Penggunaan didefinisikan sebagai konsumsi penerima dari keluaran sistem informasi.

4. Dampak individual

Dampak individual didefinisikan sebagai efek dari informasi terhadap perilaku penerimanya. Variabel yang digunakan untuk menganalisisnya adalah:

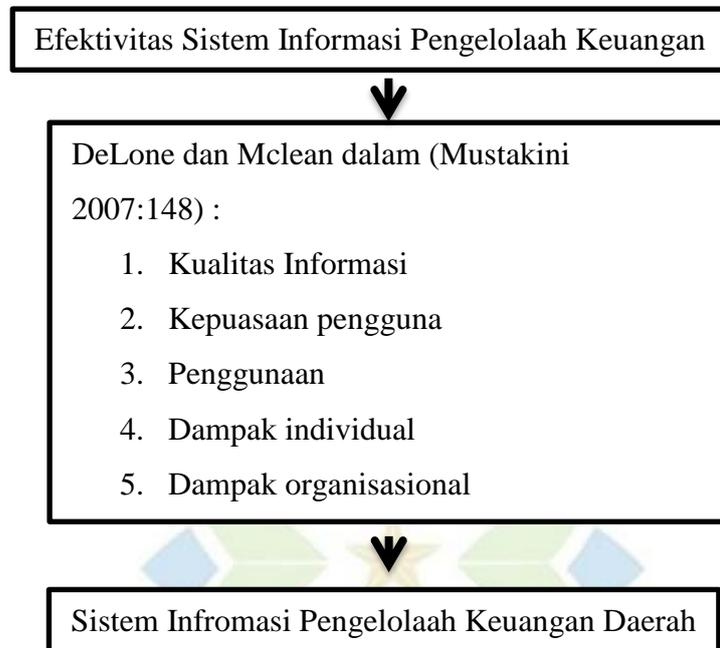
- a. Kecepatan dari indentifikasi masalah
- b. Kecepatan dari pengambilan keputusan
- c. Perpanjangan dari anlisis

5. Dampak organisasional

Dampak organisasional didefinisikan sebagai efek dari informasi terhadap kinerja organisasional. Variabel dari dimensi ini adalah:

- a. Visi organisasional
- b. Efektivitas pengambilan keputusan
- c. Kinerja organisasional persepsian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1

Pola Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Maka proposisi untuk penelitian ini adalah: Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik apabila didasarkan pada lima dimensi, yaitu Kualitas Informasi, Kepuasan pengguna, Penggunaan, Dampak individual, Dampak organisasional.